

HASIL DAN REKOMENDASI FORUM KEPALA BAPPEDA SE KTI III

Pendahuluan

Pertemuan Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI III yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 27 April 2009, merupakan tindak lanjut rekomendasi pertemuan Forum Kepala Bappeda II sebelumnya di Kupang, tanggal 9 September 2008, yang berfokus pada Integrasi Aspirasi dan Prioritas Pembangunan KTI dalam RPJMN 2010-2014. Untuk itu, dalam pertemuan Forum Kepala Bappeda III ini, pihak Bappenas menyajikan pokok-pokok rancangan naskah akademik RPJMN 2010-2014, sedangkan Koordinator Forum Kepala Bappeda Se-KTI menyajikan evaluasi perkembangan pembangunan KTI serta usulan prioritas pembangunan ke depan.

Dalam rancangan RPJMN 2010-2014, secara tegas dikemukakan pendekatan baru yang mengedepankan wawasan pembangunan wilayah. Hal ini terutama karena masih jelas terlihat ketimpangan antar wilayah di tanah air. Revitalisasi pembangunan wilayah menjadi perhatian RPJMN 2010-2014. Struktur rancangan RPJMN 2010-2014 akan terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu Buku I tentang visi dan misi, Buku II tentang Pembangunan Sektor dan Buku III tentang Pembangunan Wilayah (dengan pendekatan pembangunan berbasis pulau).

Evaluasi pembangunan KTI memperlihatkan bahwa kontribusi KTI dalam pembangunan nasional bisa diperbesar bahkan diakselerasikan bila terdapat intervensi langsung pemerintah melalui keberpihakan secara nyata dan terukur. Keberpihakan melalui alokasi program dan pembiayaan pembangunan akan berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional, terutama yang berkenaan dengan penyediaan infrastruktur (perhubungan/transportasi, produksi pangan, ekspor komoditas pertanian dan kelautan), pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, pembangunan SDM, penguatan kelembagaan Pemda.

Rangkuman pertemuan Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI III dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Integrasi Prioritas Pembangunan KTI kedalam RPJMN 2010-2014
2. Terciptanya koordinasi dan harmonisasi dengan pemerintah pusat
3. Kerja sama antar wilayah
4. Praktek cerdas (smart practices) pemerintah daerah di KTI dibidang perencanaan daerah
5. Kesimpulan dan Rekomendasi

I. Integrasi Prioritas Pembangunan KTI kedalam RPJMN 2010-2014

Sesuai dengan rancangan struktur RPJMN 2010-2014, maka diharapkan dalam uraian dan substansi pada Buku II dan Buku III (pengembangan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi) dapat secara tegas memperlihatkan keberpihakan pada pembangunan KTI, terutama untuk hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas SDM

- Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
- Perencanaan pembangunan daerah berbasis Pembangunan Manusia
- Perluasan jaringan pengamanan sosial dalam rangka mengurangi proporsi penduduk miskin
- Program yang berkaitan dengan pencapaian indikator MDG (*Millenium Development Goals*) merupakan program strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh unit kerja baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
- Modal sosial masyarakat dan kearifan lokal perlu ditingkatkan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.
- Melakukan reformasi birokrasi yang terukur dan terarah (bidang perencanaan, keuangan dan kepegawaian, dll)

2. Pengembangan Kemampuan Ilmu & Teknologi

- Ketersediaan Sumberdaya IPTEK
- Meningkatkan budaya IPTEK di kalangan masyarakat
- Meningkatkan penguasaan teknologi di tingkat aparatur pemerintahan
- Penguatan sinergi kebijakan IPTEK dengan sektor lain
- Penguatan kelembagaan pusat kajian kerjasama regional Sulawesi dan Indonesia Timur.
- Peninjauan kembali institusi dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD).
- Optimalisasi lembaga-lembaga riset perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- Pembangunan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.
- Memantau dan menindaklanjuti kerja sama Ditjen Dikti Depdiknas dan Bappenas dalam pengembangan riset dan penelitian.

3. Penguatan Daya Saing Perekonomian

- Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing provinsi melalui koordinasi yang intens untuk menjadikannya sebagai satu kesatuan rencana tata ruang wilayah KTI
- Penguatan industri manufaktur - terwujudnya iklim investasi yang kondusif
- Peningkatan Infrastruktur dan prasarana wilayah
 - Infrastruktur Perhubungan (darat, laut, dan udara)
 - Infrastruktur sumber daya air
 - Infrastruktur kelistrikan
- Peningkatan intensitas layanan transportasi laut dan udara di wilayah kepulauan terutama Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara.
- Peningkatan revitalisasi sektor pertanian dan penguatan struktur ekonomi rakyat

- Peningkatan revitalisasi sektor perikanan melalui peningkatan usaha kecil dan menengah pada sektor kelautan/perikanan ke arah *bankable* dan mendorong *public-private* partnership dalam peningkatan infrastruktur kelautan dan perikanan.
- Perlunya kerja sama antar wilayah dalam bidang ekonomi
- Industri, Perdagangan dan Investasi: promosi dan pemasaran produk-produk komoditi unggulan perdesaan
- Lingkungan hidup/SDA: akselerasi pembangunan di daerah harus diimbangi dengan manajemen dan eksploitasi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Kelestarian dan daya dukung lingkungan perlu menjadi perhatian
- Membangun prioritas dan entry point percepatan, serta penguatan daya saing KTI melalui komoditas unggulan:
 - Sulawesi (pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata)
 - Maluku (Pariwisata, perikanan)
 - Nusa Tenggara (perikanan, peternakan, pariwisata)
 - Papua (Perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan energi)

II. Terciptanya koordinasi dan harmonisasi dengan pemerintah pusat

Koordinasi antara Bappeda dengan pemerintah pusat (terutama Bappenas) perlu terus ditingkatkan sehingga tercipta kolaborasi dan kebersamaan sebagai sesama perencana. Keeratan hubungan antara Bappeda dan pemerintah pusat perlu dikembangkan kembali, melalui program kerjasama yang lebih konkrit. Dalam rangka koordinasi dan kolaborasi antara Bappeda dan pemerintah pusat, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Keberpihakan Pemerintah Nasional terhadap pembangunan KTI yang terukur dan terarah yang tercermin nyata dalam:
 - Prioritas RPJMN 2010-2014
 - Formulasi penganggaran mempertimbangkan kondisi geografis, demografi dan sosiologis KTI
 - Memanfaatkan spill-over industri dan bubble economy di Jawa (terutama yang bersifat footlose) guna menciptakan momentum percepatan dan pemerataan di KTI
2. Formulasi kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan setiap tahun melalui musrenbangnas, seyogyanya setiap daerah diberikan tanggung jawab sesuai dengan target nasional yang ingin dicapai di daerah yang bersangkutan
3. Konsistensi rencana pembangunan yang sudah dilegitimasi harusnya ditegakkan
4. Kebijakan RPJMN kedepan hendaknya ada perbedaan antara KBI dengan KTI
5. Dalam upaya meningkatkan fungsi koordinasi Bappeda di tingkat provinsi, maka diusulkan agar ditelaah kembali sistem kelembagaan dan kepengkatan
6. Koordinasi perencanaan dan pengendalian tata ruang melibatkan Bappenas dalam rangka sinkronisasi rencana program
7. Percepatan pembangunan lewat kebijakan yang memberi lebih banyak keleluasaan kepada daerah.

8. Penegasan bahwa program yang dilaksanakan di daerah harus melalui perencanaan tingkat provinsi (Bappeda Provinsi), program tidak langsung ke kabupaten/kota.

III. Kerja sama antar wilayah

Kerja sama antar wilayah dipandang perlu agar pembangunan di daerah dapat dilakukan secara terstruktur dan terpadu, serta saling terkait antar satu dengan yang lainnya secara harmonis dan sinergis, sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas fungsi perencanaan pembangunan sekaligus efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka kerja sama antar wilayah, ada beberapa hal yang disepakati:

1. Infrastruktur darat yang menghubungkan Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan
2. Kerja sama antar wilayah berdasarkan komoditas unggulan
3. Mendorong kerja sama wilayah kabupaten/kota di provinsi masing-masing: danau, lingkungan hidup, dan lain-lain.
4. Peningkatan arus perdagangan barang dan jasa antarwilayah
5. Peningkatan layanan transportasi laut dan udara antarwilayah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
6. Peningkatan kerjasama pengembangan wisata budaya di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

IV. Praktek cerdas (smart practices) pemerintah daerah di KTI dibidang perencanaan daerah

Smart practices dari Gorontalo yang bisa menjadi pembelajaran:

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari bahwa pembangunan manusia sangat penting sehingga hal yang dilakukan adalah memposisikan pentingnya pembangunan manusia ke dalam agenda lokal daerah. Pendekatannya mencakup :

- Mengembangkan perencanaan dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
- Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan berbagai perwakilan donor di bidang penguatan kapasitas sumberdaya manusia.
- Mengoptimalkan program/kegiatan dan penganggaran SKPD yang berkaitan dengan pembangunan manusia pada skala kecamatan dengan nilai rata-rata IPM dibawah IPM provinsi Gorontalo.
- Langkah-langkah penyiapan perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis pembangunan manusia:
 - Integrasi kedalam RPJMD, RKPD dan rencana strategis dan kinerja SKPD
 - Pengembangan metodologi pengukuran kinerja berdasarkan nilai IPM
 - Pengembangan kerangka regulasi dan kerangka organisasi
 - Monitoring dan Evaluasi
- Pendekatan spasial dalam musrenbang
- Pengembangan kerangka regulasi pada skala provinsi yang termuat dalam RPJMD
- Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat

V. Kesimpulan dan Rekomendasi Forum

1. Mendukung rancangan RPJMN 2010-2014 yang berbasis kepulauan melalui pendekatan dan keterkaitan sektor dan wilayah.
2. Keberpihakan Pemerintah Nasional terhadap pembangunan KTI yang terukur dan terarah dalam RPJMN 2010-2014 dan didukung oleh formulasi penganggaran yang mempertimbangkan kondisi geografis, demografi dan sosiologis KTI.
3. Kerja sama antar wilayah dipandang perlu agar pembangunan di daerah dapat dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pembangunan infrastruktur darat yang menghubungkan Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan; kerja sama antar wilayah berdasarkan komoditas unggulan; peningkatan layanan transportasi laut dan udara antarwilayah; serta peningkatan kerjasama pengembangan wisata budaya di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
4. Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing provinsi melalui koordinasi yang intens untuk menjadikannya sebagai satu kesatuan rencana tata ruang wilayah KTI dalam memberi arahan kepada perencanaan pembangunan, sehingga senantiasa penting ditegakkan dan dievaluasi.
5. Secara sendiri dan atau bersama-sama BAPPEDA provinsi di KTI memikirkan terobosan pembangunan untuk memperbesar kontribusinya pada skala pembangunan nasional.
6. Masing-masing BAPPEDA provinsi akan memberi perhatian sepenuhnya agar terdapat efektivitas proses perencanaan kabupaten/kota di wilayahnya.
7. Menetapkan langkah dan mekanisme koordinasi percepatan KTI antara lain melalui:
 - o Mengoptimalkan Forum Kepala Bappeda KTI terutama sharing smart practices
 - o Membuat Task Force sebagai simpul koordinasi kebijakan pemerintahan di KTI
8. Pertemuan Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI IV direncanakan untuk dilaksanakan di Provinsi Papua, yang waktu pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.

Daftar Peserta Forum Kepala BAPPEDA Se-KTI III:

Nama	Institusi
Syafruddin Daerlan	Kabid Perencanaan Bappeda Propinsi Papua
Drs. Ishak Hallatu	Kepala Bappeda Propinsi Papua Barat
Drs. H. Supran, MM	Sek. Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat
Ir. Benny R. Ndoenboey, Msi	Kepala Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Timur
Dr. Lucky Longdong, Med	Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Utara
Prof. DR. Hj. Winarni Monoarfa, MS	Kepala Bappeda Propinsi Gorontalo / Koordinator Forum Kepala Bappeda Se-KTI / Anggota POKJA Forum KTI
Drs. Suparman	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat
Ir. H. Tan Malaka Guntur	Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan
Drs. La Ode Ali Hanafi, Msi	Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara
Syafruddin Sapsuha	Kasubid Perencanaan Kawasan - Bappeda Propinsi Maluku Utara
Ir. MZ. Sangadji, Msi	Kepala Bappeda Propinsi Maluku
Dr. Marwah Daud Ibrahim	Anggota DPR - RI / Ketua Pokja Forum KTI
Dr. Ir. Arifin Rudyanto, MSc	Direktur Pengembangan Wilayah -Bappenas
Drs. Iman Bonila Sombu, MSc	Kasubdit Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian SDA – Depdagri
Dr. Patta Tope. MA, SE	Pokja Forum KTI/Focal Point JiKTI Sulteng
Dr. Agus Salim, MS	Focal Point JiKTI Wil. Sulawesi Selatan
Prof. Ngakan Putu Oka	Focal Point JiKTI Wil. Sulawesi Selatan
Arryanto Husain	Kabid Perencanaan Ekonomi Daerah – Bappeda Propinsi Gorontalo
Dr. Ir. B. Elim Somba, MSc	Sekretaris Jendral Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS)
Darmawan Salman, MSc	PSKMP Universitas Hasanuddin

Nama	Institusi
M. Nasser Parawangsa	Sekretaris Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan
Drs. A. Irawan Bintang, MSi	Kabid Pengembangan Kelembagaan & SDM Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan
Drs. Diagusta B. Randa, Msi	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan/ Koordinator Wilayah FKTI Sulawesi Selatan
Yudianto	Direktorat Pengembangan Wilayah - Bappenas
Jana Hertz	Decentralization Support Facility (DSF)
Sartono	ACCESS Project Phase II -AusAID
Bill Duggan	BASICS - CIDA
Sakuma Hiroyuki	JICA Capacity Development Project
Sachiko Suzuki	JICA Makassar Field Office
Ida Gosal	JICA Makassar Field Office
Matsui Kazuhisa	JICA Expert